

Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Sania Putriana¹, Saniyah Oktarisma², Nurhizrah Gistituati³

Pendidikan Dasar, Universitas Negeri Padang

Email: saniaputriana@gmail.com, Saniyahoktarisma50@gmail.com, icha_yp@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini membahas dan menganalisis tentang kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan penelitian melalui kajian pustaka yang dilakukan, langkah-langkah kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sekolah diuntut dalam meningkatkan mutu pendidikan. Manfaat dari penelitian ini adalah agar terciptanya kebijakan kepala sekolah untuk memimpin serta mengelola kegiatan di sekolah dan akhirnya bisa meningkatkan kinerja guru, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) serta meningkatkan kinerja guru melalui pengelolaan kegiatan-kegiatan di sekolah yang dibentuk oleh kepala sekolah.

Kata kunci: *kebijakan, kepala sekolah, mutu pendidikan*

Abstract

This paper discusses and analyzes the policies of school principals in improving the quality of education. Based on the research through the literature review carried out, the steps of the principal's policies in improving the quality of education, namely policy formulation, policy implementation, policy evaluation. As we know that schools are required to improve the quality of education. The benefits of this research are for the creation of a principal policy to lead and manage school activities and ultimately improve teacher performance, so as to improve student learning achievement, the availability of Human Resources (HR) and improve teacher performance through the management of activities in schools established by the head of the school.

Keywords: policy, school principal, quality of education

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah suatu hal yang penting sekali untuk menentukan perkembangan dan perwujudan diri individu, dan bagi kehidupan suatu bangsa. Menyadari akan pentingnya peranan pendidikan sebagai pendorong kemajuan suatu bangsa, maka pemerintah senantiasa berupaya untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan tenaga pendidikan, pembiayaan, sistem, kurikulum, dan lain sebagainya.

Dalam mengelola pendidikan terkhusus pada suatu sekolah adalah tugas kepala sekolah supaya mutu pendidikan di sekolah berkelas dengan mencanangkan program, diawali dengan mencanangkan kebutuhan Sumber Daya Manusia yang akan dapat melakukan tugas, mencanangkan kebijakan berwujud program kepala sekolah serta kurikulum yang hendak dijalankan di sekolah.

Sekolah adalah suatu institusi sosial yang mempunyai fungsi esensial untuk menumbuhkan watak siswa transformasi budi pekerti kebudayaan berlangsung dengan belajar mengajar yang sinkron dengan kurikulum yang berisi bermacam bidang ilmu pengetahuan serta nilai-nilai yang berfungsi di masyarakat dalam rangka mencerdaskan serta memperbaiki nasib hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan sekolah yang berkembang akan mempunyai kontribusi yang besar untuk

kemajuan suatu bangsa sehingga tidak bisa diabaikan eksistensinya sebagai tempat dalam mengajarkan serta mendidik ilmu pengetahuan untuk siswa dari generasi ke generasi.

Dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) pembangunan, pendidikan bukan hanya terfokus pada kebutuhan material tetapi harus menyentuh dasar dalam memberikan sikap pada visi dan misi pendidikan, seperti perhatian menyeluruh terhadap spiritual yang luhur serta etika dan moral. Dalam hal ini derajat pendidikan dipengaruhi oleh penyempurnaan sistem kepada seluruh komponen pendidikan yaitu iklim pembelajaran yang kondusif, peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan penyebaran guru, sumber belajar, kurikulum yang disempurnakan, sarana dan prasarana yang memadai, serta didukung oleh kebijakan (*political will*) pemerintah, baik pusat maupun di daerah dan termasuk kebijakan kepala sekolah. Menurut Zulfahri (2021) kepala sekolah merupakan individu yang ikut bekerjasama dalam terlaksananya pembelajaran di organisasi sekolah.

Dalam bidang pendidikan di era globalisasi problem yang serius untuk bidang pendidikan di negara kita yaitu minimnya mutu pendidikan di bermacam jenjang dan jenis pendidikan. Berbagai golongan masyarakat, termasuk ahli pendidikan, bahwasanya problem mutu pendidikan sebuah proses pendidikan sebagai salah satu aspek yang bisa menghambat penyediaan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk modal utama pembangunan bangsa dalam berbagai bidang. Terutama dalam mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar masih rendah

Mutu pendidikan suatu institusi sekolah yang sangat di perlukan karena suatu pencipta karakteristik penerus bangsa. Melahirkan *Intelligence Quotient* (IQ), *Emotional Quotient* (EQ), *Emotional Spiritual Quotient* (ESQ). Kepala sekolah sebagai pemimpin didambakan mampu membentuk lulusan sesuai dengan yang didambakan oleh bangsa dan yang sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditentukan pendidikan yang bermutu tidak hanya dilihat dari kualitas lulusannya tetapi juga meliputi bagaimana lembaga pendidikan bisa memwujudkan kebutuhan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua dan masyarakat sesuai dengan standar mutu yang berlaku.

Sejalan dengan berkembangnya zaman yang terus bergulir mengarah kearah perkembangan, dalam zaman kompetisi yang semakin bebas seperti saat ini. Pemimpin lembaga pendidikan diharuskan untuk bisa mempertaruhkan derajat pendidikan yang bermutu karena pendidikan yang belum bermutu lama kelamaan akan ditinggal oleh masyarakat dan tercampakkan dengan sendirinya.

Oleh sebab itu, sekolah diwajibkan untuk dapat memajukan mutu pendidikan dengan cara perwujudan kebijakan kepala sekolah untuk menuntun dan mengelola aktivitas di sekolah sehingga bisa meningkatkan kinerja guru, dan pada akhirnya meningkatkan prestasi belajar siswa serta penyediaan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja guru dengan mengelola kegiatan-kegiatan di sekolah yang di bentuk oleh kepala sekolah.

Jadi berkualitas atau tidaknya suatu mutu di sekolah bisa terlihat terhadap peran kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pengawasan dan pengelolaan yang baik dan benar serta objektif menjadi kunci berkualitasnya kegiatan dan program sekolah. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD.

METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode studi kepustakaan (*library research*). Studi literatur atau studi kepustakaan adalah kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber bacaan (Harahap: 2014). Data yang dipakai untuk menyelesaikan artikel ini berasal dari sumber berupa buku, jurnal serta artikel yang sesuai dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Kebijakan Kepala Sekolah

Kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan publik. Kebijakan publik adalah kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat umum. Kebijakan publik adalah bagian dari keputusan politik, dimana keputusan itu mempengaruhi dan berkaitan dengan masyarakat dan di pahami sebagai pilihan terbaik dari beragam opsi yang berkaitan dengan masalah publik yang menjadi wewenang pemerintah (Kusumawati, 2019).

Nurharjatmo menyebutkan beberapa aspek yang terpengaruh dalam kinerja kebijakan antara lain; 1) sasaran dan standar tertentu yang mesti dicapai oleh para pelaksana kebijakan, 2) tersedianya sumber daya, baik itu yang berbentuk dana, teknologi, sarana maupun prasarana lainnya, 3) karakteristik birokrasi pelaksana, 4) komunikasi antara organisasi yang baik, 5) kondisi sosial, ekonomi, dan politik (Amin et al., 2019).

Beberapa faktor yang meliputi kebijakan pendidikan antara lain: 1. Kebijakan pendidikan yang diperbarui dari kesatuan teori dan praktek 2. Kebijakan pendidikan berpotensi untuk pengembangan pribadi dan masyarakat yang memiliki pendidikan tersebut 3. Kebijakan pendidikan ditujukan untuk kebutuhan peserta didik 4. Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran visi, misi dan tujuan pendidikan 5. Kebijakan pendidikan mempunyai tujuan yang jelas untuk melahirkan pendidikan yang tepat (Irmayani, Wardiah, & Kristiawan., 2018).

Fungsi Kebijakan Pendidikan

Aspek yang menentukan perkembangan, perubahan atau rekonstruksi organisasi yaitu pelaksanaan kebijakan organisasi sehingga bisa dirasakan bahwasanya kebijakan tersebut betul berfungsi dengan baik. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwasanya kebijakan yang dibentuk menjadi arahan untuk bertindak, mempedomani kegiatan untuk organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kebijakan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

1. Fungsi alokasi

Untuk menjalankan fungsi penting tersebut, analisis kebijakan harus dapat melibatkan diri, atau setidaknya mempelajari sistem dan proses pengambilan kebijakan negara baik pada level suprastruktur (politik) maupun pada level sektoral (teknis).

2. Fungsi inquiri

Fungsi inquiri dapat dilaksanakan jika seluruh atau sebagian dari / dengan agenda penelitian dan pengembangan telah dilaksanakan dan telah mencapai hasil. Dalam fungsi inquiri pelaksanaan analisis kebijakan berkaitan dengan pendekatan, metodologi, serta teknik analisis.

3. Fungsi komunikasi

Fungsi komunikasi merupakan fungsi yang bisa dijalankan apabila analisis kebijakan membuahkan ide atau usulan kebijakan yang benar-benar realistis (Noor & Sikand, 2008).

Model Kebijakan Pendidikan

Dalam rangka melakukan dan menentukan suatu kebijakan pendidikan di suatu sekolah harus digunakan bermacam jenis model kebijakan pendidikan agar tujuan yang akan dicapai bisa terlaksana dengan baik. Model pendekatan yang dibutuhkan untuk menetapkan kebijakan pendidikan di sekolah meliputi :

1. Model Rasional murni yaitu model yang menumbuhkan kebijakan secara rasional
2. Model Ekonomi yaitu model yang menumbuhkan kebijakan atas dasar pertimbangan faktor ekonomi, model keputusan berurutan adalah kebijakan yang melandasi pengambilan keputusan beberapa alternatif kebijakan.
3. Model Ekperimentasl yaitu model yang menggunakan pendekatan melangkah atas dasar perubahan bertahap.
4. Model memuaskan yaitu model yang melandasi keputusan atas dasar alternatif kebijakan yang sangat memuaskan tanpa menilai kritis alternatif lain, dan

5. Model Optimal yaitu model yang melandasi pengambilan keputusan atas dasar campuran sebagian metode yang terintegrasi dalam mewujudkan kebijakan yang optimum serta bisa di terima oleh semua pihak

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kepala sekolah dalam pengambilan kebijakan dengan menggunakan model kebijakan sehingga pengambilan keputusan dalam membuahkan kebijakan yang optimum serta bisa diterima oleh semua pihak berjalan dengan lancar sinkron dengan tujuan yang sudah dibuat oleh kepala sekolah dengan menjalin kerjasama yang baik antar semua komponen-komponen sekolah

Jenis Kebijakan Perencanaan Nasional Pendidikan

Kebijakan Jangka Panjang (jangka waktu 25 tahun), merupakan kebijakan jangka panjang yang pada dasarnya bersifat prospektif (antisipasi masa depan), yaitu kebijakan negara bidang pendidikan yang ditentukan oleh proyeksi pendidikan untuk jangka waktu yang akan datang. Rencana ini dikarenakan untuk membuahkan skenario pendidikan dan budaya masa depan di Indonesia yang perlu dibentuk pada akhir periode pembangunan jangka panjang kedua (Fathurrochman, 2017).

Kebijakan jangka menengah, Secara garis besar gambaran laporan: a). Arah dan kebijakannreplita. b). Kondisi dan permasalahan, permasalahan pokok disimpulkan dari kondisi pendidikansebagai hasil kajian dan penilaian penyelenggaraan pendidikan pada laporan sebelumnya. c). Kebijakannndan langkah-langkah, kebijakan ini dikembangkan berlandaskan analisismasalah pendidikan saat ini dan prediksi untuk lima tahun ke depan. d). Sasaranndan program, apabila kebijakan yang diterangkan di atas sudah dilakukan (PemerintahhRepublik Indonesia, 2005).

Kebijakannjangka pendek dalam perencanaan tahunan meliputi empat periode dengan waktu tiga bulan untuk masing-masing periode yanggdapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, tahappersiapan perencanaan, tahap ini adalah penyusunan data terutama yang berkaitanndengan jumlah siswa yang akan dilayani, staf, fasilitas dan infrastruktur dan peralatan yang dibutuhkan. Kedua, periodeeini adalah waktu untuk merumuskan dan menerbitkan kebijakan. Ketiga, urusannproyek dan penetapan pagu anggaran. Jangka waktu pelaksanaan anggaran proyek yang diusulkan. Keempat, selama periode ini persiapannpelaksanaan proyek pembangunan telah dilakukan dan persiapan siklus perencanaan untuk tahunnberikutnya telah dimulai dan dilaksanakan (Pemerintah Republik Indonesia, 2005).

Komponen Kebijakan

Menurut Yanto (2019) kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah mempunyai beberapa komponen yang sudah dirumuskan sebagai berikut:

1. Perumusan masalah
Perumusan masalah bisa menolong menemukan asumsi tersembunyi, media, memetakan kemungkinan tujuan, menggabungkan pandangan yang berkelainan, dan membentuk kebijakan baru.
2. Peramalan
Peramalan dapat memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa depan: (1) Proyeksi adalah prakiraan yang didasarkan pada ekstrapolasi atas kecenderungan masa lalu dan masa kini ke masa depan, (2) Prediksi adalah prakiraan yang didasarkan pada asumsi teoritis asertif. (3) Estimasi adalah prediksi yang didasarkan pada penilaian informatif atau penilaian ahli tentang situasi masyarakat di masa depan.
3. Rekomendasi
Rekomendasi kebijakan merupakan cara dimana suatu kebijakan bisa mencapai tujuannya. Untuk rekomendasi kebijakan, yang harus diamati yaitu prasyarat dalam kesuksesan implementasi kebijakan.
4. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penyelidikan kebijakan yang diperlukan dalam memberikan informasi tentang sebab dan akibat kebijakan publik.

5. Evaluasi

Evaluasi menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara yang diharapkan dan kinerja kebijakan yang dihasilkan

Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kepemimpinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Berasal dari kata dasar "pimpin" yaitu diawali dengan "memimpin" kemudian diartikan sebagai membimbing, menunjukkan jalan dan menuntun dalam kata ini artinya dapat disamakan dengan mengetahui, menuntun, membimbing dan melatih dalam pengertian mendidik dan mengajar agar bisa dikerjakan sendiri (Pramudyo, 2010).

Kepala sekolah sebagai pemimpin dalam praktik sehari-hari harus selalu berupaya mengamati serta mengamalkan tujuh fungsi kepemimpinan dalam kehidupan sekolah: 1) kepala sekolah sebagai pendidik (educator); 2) kepala sekolah sebagai administrator; 3) kepala sekolah sebagai pemimpin; 4) kepala sekolah sebagai motivator; 5) kepala sekolah sebagai manajer; 6) kepala sekolah sebagai pengawas; 7) kepala sekolah sebagai inovator (Irmayani dkk, 2018).

Peran dan Tugas Kepala Sekolah

Peran kepala sekolah dapat berlangsung di dalam dan di luar organisasi. Oleh karena itu, salah satu fungsi fundamental seseorang untuk organisasi lain sebagai manajer yaitu kepemimpinan. (Fadilah: 2019) Sebagai pemimpin, tugas dan peran kepala sekolah harus kompleks untuk mewujudkan sekolah yang berbobot. E Mulyasa dalam Asmani (2012) menjelaskan tentang tugas dan peran kepala sekolah secara rinci yaitu:.

1. Sebagai pendidik dalam meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan sekolah, membentuk iklim sekolah yang kondusif, memberikan nasehat kepada warga sekolah, menyemangati seluruh tenaga kependidikan, dan mengakselerasi siswa yang pandai di atas rata-rata.
2. Sebagai manager untuk memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerja sama, memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan dalam memajukan pekerjaannya, serta merangsang keterlibatan di seluruh pusat pendidikan.
3. Sebagai administrator, dalam mengatur kurikulum, siswa, kepegawaian, sarana prasarana, keuangan serta kesiapan.
4. Sebagai pengawas, dengan mengamati prinsip-prinsip yang akan dilakukan secara demokratis, berpusat pada tenaga kependidikan (guru).
5. Sebagai inovator, dalam trik yang benar untuk membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari ide-ide baru, serta mewariskan teladan bagi semua tenaga kependidikan.
6. Sebagai motivator. Mewariskan motivasi terhadap tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang akan memotivasi kepala sekolah dalam menumbuhkan produktivitasnya untuk memajukan sekolah, hingga dapat memberikan motivasi dan inspirasi terhadap bawahannya untuk bangkit mengajar.

Model Kebijakan Kepala Sekolah

Model kebijakan adalah suatu wujud kebijakan yang bisa diambil berdasarkan beberapa estimasi oleh kepala sekolah dalam memajukan baik dari pertimbangan tujuan, strategi, ataupun kebutuhan lingkungan. Adapun model kebijakan yaitu.

1. Model Deskriptif

Model pendekatan deskriptif merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh penelitian di bidang sains (baik sains murni maupun terapan) untuk menjelaskan gejala-gejala yang terjadi di masyarakat.

2. Model Normatif

Diantara beberapa macam model normatif yang digunakan dalam analisis kebijakan adalah model normatif yang membantu menetapkan tingkat kapasitas pelayanan yang optimal, dalam hal ini kepala sekolah memberikan ide atas hasil pemikirannya sehingga pengambil keputusan bisa menyelesaikan masalah kebijakan. Pendekatan normatif ditekankan pada pertimbangan serangkaian tindakan yang mampu menyelesaikan masalah yang diperlukan masyarakat pada seluruh jenjang dan jenis pendidikan.

3. Model verbal

Model verbal merupakan suatu kebijakan yang diformulasikan dalam bahasa sehari-hari, disini kepala sekolah membentuk kebijakan dengan memakai bahasa sehari-hari misalnya dengan memakai gaya atau ekspresi kepemimpinan yang sudah dibentuk.

4. Model sebagai Pengganti dan Perspektif

Pendekatan model perspektif adalah cara ilmiah dalam menganjurkan suatu norma, kaidah yang bisa dipakai oleh pengguna dalam mengatasi suatu masalah, khususnya masalah kebijakan. Model bentuk perspektif juga umumnya berupa pilihan kebijakan sebagai hasil analisis data. Model pengganti disimulasikan sebagai pengganti dari masalah-masalah yang substantif. Model pengganti mulai disadari atau tidak dari asumsi bahwasanya masalah formal merupakan representasi yang sah dari masalah yang substantif. Sedangkan model perspektif dilandaskan pada anggapan bahwa masalah formal tidak pernah sepenuhnya merepresentasikan masalah substantif. Hal ini perlu dikarenakan penyelesaian masalah pendidikan ini harus dilakukan dengan baik, jika tidak maka akan menimbulkan kemudharatan baik dari segi waktu, materi, maupun penyelewengan dari tujuan yang telah ditetapkan (Fadilah: 2019).

Langkah-langkah Kebijakan Kepala Sekolah

Dalam kebijakan pendidikan ada tiga tahapan kebijakan antara lain: formulasi, implementasi dan evaluasi. Kepala sekolah sebagai pejabat profesional wajib merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Ketiga langkah kebijakan kepala sekolah tersebut yaitu sebagai berikut

1. Formulasi kebijakan

Formulasi merupakan pembuatan atau perumusan. Jadi, formulasi kebijakan merupakan pembuatan / perumusan suatu kebijakan pendidikan.

2. Implementasi Kebijakan

Pada prinsipnya implementasi suatu kebijakan merupakan suatu cara yang dilakukan agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan adalah rangkaian kegiatan dan keputusan yang memfasilitasi pernyataan kebijakan dalam pembuatan kebijakan menjadi praktik atau realisasi.

3. Evaluasi Kebijakan

Setelah kebijakan tersebut diterapkan, dilakukan evaluasi terhadap kebijakan pendidikan. Karena Anda bisa mengetahui sejauh mana implementasi ini telah dicapai.

Mutu Pendidikan

Mutu merupakan pemuasan keinginan stakeholders, mempunyai sistem preventif, memiliki standar tanpa cela dan memiliki tolak ukur harga ketidakpuasan. Mutu dalam pendidikan diantaranya mutu masukan, keluaran dan hasil. Input pendidikan berkualitas apabila siap diproses, proses pendidikan bermutu jika dapat membentuk keadaan pendidikan yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

Mutu pendidikan, adalah salah satu asas pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang sangat perlu dalam membentuk suatu negara. Justru bisa dikatakan bahwasanya masa depan suatu negara terletak atas adanya pendidikan yang bermutu saat ini, pendidikan yang bermutu hanya dapat tumbuh apabila ada lembaga pendidikan yang bermutu. Oleh sebab itu, upaya

peningkatan mutu pendidikan adalah salah satu kiat untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu (Kuntoro, 2019).

Standar mutu pendidikan di Indonesia diatur dalam Standardisasi Nasional yang dikenal sebagai Standar Nasional Pendidikan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal sistem pendidikan di semua yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Erni, 2017)

Komponen Peningkatan Mutu Pendidikan

Saleh dalam (Yanto: 2019) mengatakan bahwasanya dalam upaya melaksanakan peningkatan mutu pendidikan nasional dengan berbagai pelatihan dan kompetensi, pengadaan buku serta perangkat pembelajaran, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu pengelolaan pendidikan. Ada beberapa komponen yang bisa meningkatkan mutu pendidikan, antara lain:

1. Proses pendidikan; Pikiran utama yang tertuang dalam prinsip, strategi, dan proses pembelajaran tampak bahwasanya pendidikan tidak sesederhana proses penyampaiannya.
2. Prosedur pendidikan; Pengembangan kegiatan belajar mengajar harus berorientasi pada fitrah manusia untuk mencapai keseimbangan.

Menurut Sudarwan Danim, peningkatan kualitas madrasah (Yanto: 2019) melibatkan lima faktor:

1. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif
2. Siswa, "anak sebagai pusat" sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat terekplorasi
3. Keterlibatan guru yang maksimal
4. Kurikulum yang tetap tetapi dinamis, sehingga sasaran mutu bisa tercapai
5. Jaringan kerjasama bukan hanya spesifik kepada sekolah dan lingkungan masyarakat melainkan melalui organisasi lain, misalnya perusahaan / instansi
6. Pimpinan serta karyawan harus menjadi satu tim yang utuh (team-work) yang sama-sama memerlukan serta sama-sama mengisi kekurangan hingga target (tujuan) akan terbentuk dengan baik.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, Sudarwan Danim (2007: 56) menjelaskan bahwasanya apabila suatu lembaga ingin meningkatkan mutu pendidikannya setidaknya harus mengaitkan lima faktor dominan, antara lain:

1. Kepemimpinan kepala sekolah; Kepala sekolah wajib mempunyai serta mengerti visi dan misi kerja yang pasti, bisa serta ingin bekerja keras, memiliki tingkat kerja yang rajin serta sabar untuk bekerja, memberikan bantuan yang optimum, serta memiliki disiplin kerja yang tinggi.
2. Guru; Keterlibatan guru yang maksimal, dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam seminar, workshop dan pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut dapat diimplementasikan di sekolah.
3. Siswa; Pendekatan yang wajib ditempuh merupakan "anak sebagai pusat" agar kompetensi serta kemampuan siswa bisa terekplorasi sehingga sekolah dapat menginventarisasi kemampuan yang ada pada siswa.
4. Kurikulum; Adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, serta terintegrasi bisa membolehkan dan memfasilitasi standar mutu yang didambakan dan akhirnya tujuan (objektif) bisa didapatkan secara maksimal.
5. Jaringan Kerja Sama; Jejaring kerjasama bukan hanya tespesifik kepada lingkungan sekolah serta masyarakat (orang tua dan masyarakat) melainkan melalui organisasi lain misalnya perusahaan atau instansi pemerintah agar keluaran dari sekolah bisa terserap di dunia kerja.

Berdasarkan argumen di atas, bisa diuraikan bahwasanya kepala sekolah dan guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Berdasarkan penelitian Murni Yanto (2019), kebijakan manajemen kepala madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Rejang Lebong yaitu dengan menerapkan (1). Kebijakan Kepala Madrasah adalah mengutamakan sekolah untuk pengembangan kurikulum serta pengembangan profesi guru dengan kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG). (2). Kebijakan kepala sekolah dikerjakan dengan aspek internal serta eksternal sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Rejang Lebong: membina kejujuran guru, penghargaan, iklim komunikasi yang demokratis.

Sementara itu, penelitian dari Nur Fadilah (2019) proses kebijakan kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan merencanakan atau merumuskan kebijakan yang dibuat seperti bekerja sama supaya kebijakan yang sudah dibuat bisa dilaksanakan serta diimplementasikan dengan melakukan kebijakan yang dibuat dan yang terakhir yaitu melaksanakan evaluasi yang mana programnya adalah visi dan misi sekolah, program Tahfizul Al Qura'an, program sistem *full day school* dan sistem ekstrakurikuler dalam rangka peningkatan mutu pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan, maka ada beberapa hal yang perlu disimpulkan bahwa kebijakan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan menerapkan peran dan tugas kepala sekolah dengan baik. Kepala sekolah sebagai pemimpin seharusnya dalam praktek sehari-hari selalu berusaha memperhatikan dan mempraktekkan tujuh fungsi kepemimpinan di dalam kehidupan sekolah: 1) kepala sekolah sebagai edukator (pendidik); 2) kepala sekolah sebagai manajer; 3) kepala sekolah sebagai administrator; 4) kepala sekolah sebagai supervisor; 5) kepala sekolah sebagai leader; 6) kepala sekolah sebagai inovator; 7) kepala sekolah sebagai motivator. langkah-langkah kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M., Arsil, Fathurrochman, I., Bahri, S., & Rahmaningsih, S. (2019). *Manajemen Mutu Pendidikan Pada Perguruan Tinggi*(1st ed.). Rejang Lebong: LP2 IAIN Curup.
- Asmani, Jamal Ma'mur (2012) "*Tips Menjadi Kepala Sekolah Propesinal*" Jogjakarja Diva Press
- Erni Agustina, Suwartini (2017). Supervisi Akademik Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 24(2), 62–70.
<https://doi.org/10.17509/jap.v24i2.8294>
- Harahap, N. 2014. Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*. Vol 8. No.1
- Fadilah, N. U. R., Manajemen, J., Islam, P., Ilmu, F., Dan, T., Negeri, U. I., & Utara, S. (2019). *Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP IT Nurul Ilmi Medan Estate*.
- Fathurrochman, I. (2017). Pengembangan kompetensi pegawai aparatur sipil negara (ASN) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup. *Manajer Pendidikan*, 11(21), 120–129
- Irmayani, H., Wardiah, D., & Kristiawan., M. (2018). The strategy of SD Pusri in improving educational quality. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 7(7), 113–121
- Kuntoro, A. T. (2019). Manajemen Mutu Pendidikan Islam. *Jurnal Kependidikan*, 7(1), 84–97. <https://doi.org/10.24090/jk.v7i1.2928>
- Kusumawati, M. P. (2019). Harmonisasi Antara Etika Publik Dan Kebijakan Publik. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i1.794>
- Noor, F. A., & Sikand, Y. (2008). *The Madrasa in Asia Political Activism and Transnational Linkages*(1st ed.; M. van Bruinessen, Ed.). Amsterdam: Amsterdam University Press.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia, Tentang Guru dan Dosen. Retrieved from <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/02/uu-nomor-14-tahun-2005-ttg-guru-dan-dosen.pdf>
- Pramudyo, A. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Dosen Negeri Pada Kopertis Wilayah VYogyakarta. *Jurnal Bisnis: Teori Dan Implementasi*, 1(1), 1–11. Retrieved from <http://journal.umy.ac.id/index.php/bti/article/view/2407>
- Sudarwan Danim. 2007. *Visi Baru Manajemen Sekolah*. Jakarta : Bumi Aksara
- Yanto, M., & Fathurrochman, I. (2019). Manajemen kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 7(3), 123. <https://doi.org/10.29210/138700>
- Zuldesiah, Nurhizrah Gistituati, Ahmad Subandi. (2021). Kontribusi Gaya Kepemimpinan dan Pelaksanaan Supervisi Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru-guru Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*. 5(2), 663-671. <http://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/791/pdf>